

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, S.H., M.H. (2011). Buku Hukum Pajak.

Andi Arifwangsa Adminigra, Subhan, Muhammad Nur. (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DISPENDA Kota Makassar. *Jurnal Perspektif*. Vol.2 Nomo 01.

Bapenda Kampar. (2019), Tarif Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan. URL: <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/20851-jenis-pajak-daerah-berdasarkan-undang-undang-nomor-1-tahun-2022-tentang-hubungan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-hkpd>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023

Damas Dwi Anggoro, S.AB, MA. (2017). Buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. (2021). Buku Ajar Otonomi Daerah (Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi.

Dr. R. Agoes Kamaroellah, M.Si. (2021). Buku Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui ontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan daerah).



Dezan Aprilyanti Syam. (2020). Analisis Pertumbuhan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Skripsi*.

Fatmawawati A. Rahman. (2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Economix Volume 5*.

Hasna, Rosnaini Daga, Sujatmiko. (2022). Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Sains Manajemen Nitro, Volume 1 Nomor 1*.

Hesti Peratiwi. (2019). Kontribusi PBB dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar). (Karya Tulis Ilmiah Universitas Muhammadiyah Makassar)

Irwan, Sahlan Sidjara, Asmelia Putri Aryati. (2022). Pengelompokan Jenis Penerimaan Pajak di Kota Makassar Menggunakan Fuzzy Clustering. *EULER: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains, dan Teknologi, Juni 2022, Vol. 10, No. 1, Hal 98-102*.

Jenni Hidayathi Putri. (2018). Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cianjur. (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)



Kemenkeu Pedia. (2022). Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). URL: <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/20851-jenis-pajak-daerah-berdasarkan-undang-undang-nomor-1-tahun-2022-tentang-hubungan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-hkpd>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023

Khaeriel Hasanuddin, Neng Indriyani, Astuty Hasti. (2020). Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bnagunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal ACCOUNTING Vol. 01, No. 03, September 2020, pp 394-403.*

Lucia Silveria Napitupulu, Novi Budiarmo. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBRA, Vol 3 No.1, Hal 463-472.*

Lina Mariana. (2019). Mekanisme Penagihan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Volume 15 No 2 Tahun 2019.*

Meggie Anastasia Rampengan, Jenny Morasa, Rudy Pusung. (2021). Analisis Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBRA*, Vol.9 No.2, Hal 326-335.

Muhammad Nasrun, Muhammad Adil, Bakri. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, Volume 5 Issue, Page 749-762.

Musdalifa Mansyur. (2018). Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar). *Jisipol (jurnal stisipol) Raja Haji Tanjungpinang Vol. 2 No. 1 (256-270)*

Neng Suryanti Nengsih, Supriyadi Ningsih. (2020) Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH.

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

Puja Rizqy Ramadha. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera tara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.



Putri Kemala Dewi Lubis. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)* Vol 6 No. 1.

Putu Ayu Fitriani. (2022). Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak. URL: <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023.

Qorih Alawiyah Sutarjo. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Makassar. (Universitas Hasanuddin)

Raudhatun Wardani, Wilda Fadhila. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol.2, No.3, Halaman 10-17.

Riswan Wagola. (2021). Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu. (Universitas Muhammadiyah Malang).

Ronal Ravianto, Amin Purnawan. (2017). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Pendekatan Self Assessment system. *Jurnal Akta*, Vol, 4 No.4.



Siti Aisyah. (2019). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *78. Accumulate Journal, Vol.1 No.*

Sarnani, Sylvia Sjarlis, Zainal Abidin. (2019). Optimalisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Usaha Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar), *JPMI: Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia, Volume 2 Nomor 1, Hal 63-77.*

Sakaria To Anwar, Hasbi, Ridwan Syam. (2022). Metodologi Penelitian Sosial. Bandung. *Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari.*

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Ansar, SE, MM Selaku Kepala Subbidang Koordinasi, Perencanaan, dan Regulasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar



Wawancara dengan bapak Indirwan Darmayasir, S.ST Selaku Kepala UPT PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar





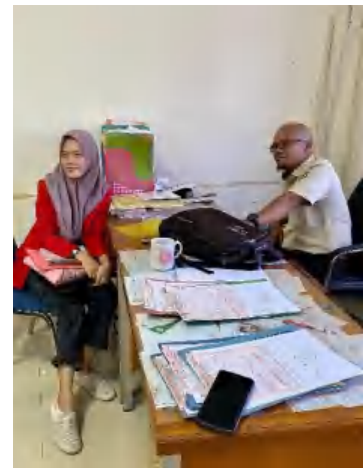
Wawancara dengan Bapak Andi Reza Nugraha, S.STP Selaku Kepala Bidang Koordinator, Pengawasan, dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar



(a)



(b)



(c)



Wawancara dengan Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Koordinator Kecamatan Tallo (b) Koordinator Kecamatan Sangkarrang (c) Koordinator Kecamatan Manggala



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Wawancara dengan Masyarakat

- (a) Bapak Imran (b) Bapak Syahrial (c) Bapak Ilyas (d) Ibu Ida
(e) Bapak Imbran

